

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka secara kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan gambaran sebagai berikut

- a. Jumlah koperasi tahun 2006 di 31 propinsi adalah 1517 kopwan. Tertinggi jumlah kopwan terdapat di Propinsi Jatim sebanyak 212 koperasi. Sementara yang terkecil jumlahnya terdapat Maluku Utara yang hanya berjumlah 8 kopwan.
- b. Dari keseluruhan jumlah kopwan yang didata termasuk dalam kategori aktif yaitu bahwa kopwan tersebut secara rutin-baik pengurusnya, anggotanya, dan kegiatan-kegiatannya berjalan secara rutin. Namun jika dilihat seberapa banyak kopwan yang telah melaksanakan RAT, data memperlihatkan bahwa kopwan yang telah menyelenggarakan RAT berjumlah 52 persen dan 48 persen tidak memberikan datanya. Dari angka 48 persen tersebut artinya bahwa kopwan tersebut bias telah melaksanakan RAT tetapi tidak memberikan datanya, atau memang belum melaksanakan RAT dan tidak memberikan datanya. Ketiadaan data yang memadai mengenai posisi koperasi dalam penyelenggaraan RAT di propinsi-propinsi tertentu (lihat lampiran) mengindikasikan kelemahan dinas koperasi kabupaten/kota untuk memantau dan mengontrol koperasi yang berada di bawah koordinasinya, sehingga dapat memiliki data perkembangan koperasi yang terbaru.
- c. Jenis usaha koperasi terbanyak adalah simpan pinjam (56,11 persen), serba usaha (23,11 persen), produksi (0,31 persen), konsumsi (1,39 persen), tidak ada data (19,09 persen).
- d. Total jumlah anggota koperasi di 31 propinsi berjumlah 220.740 orang dengan rata-rata anggota per kopwan adalah kurang lebih 205 orang.
- e. Total modal yang dimiliki kopwan yang tercatat kurang lebih Rp 831 milyar, dalam hal ini termasuk modal sendiri dan modal luar.

- f. Total modal sendiri berjumlah kurang lebih Rp 426 milyar atau sekitar 51,24 persen dari total modal kopwan. Jumlah modal sendiri terbesar ada di Kopwan Kartika Chandra (Jawa Timur) sebesar Rp 20.449 milyar
- g. Total modal luar berjumlah sekitar Rp 405.5 milyar atau sekitar 48,76 persen. Modal luar terbesar terdapat pada kopwan yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, dengan modal luar sebesar Rp 4,460.milyar. Sumber modal yang teridentifikasi dari penelitian ini berasal dari : bank, dana bergulir (bantuan pemerintah) berupa program agribisnis dan dana subsidi BBM dan lain-lain.
- h. Jumlah koperasi yang memiliki manajer adalah sebanyak 334 koperasi (25,8 persen), sementara sisanya tidak memberikan data. Ketiadaan data memperkuat indikasi kelemahan sistem pemantauan regular terhadap perkembangan kopwan yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait. Sedikitnya jumlah koperasi yang memiliki manajer bukan berarti sistem manajemen dalam koperasi tidak berjalan. Sistem manajemen koperasi saat ini pada umumnya dilakukan atau dilaksanakan secara paralel dengan tugas-tugas kepengurusan koperasi.
- i. Total jumlah karyawan di seluruh kopwan (31 propinsi yang disensus) berjumlah 1760, yang terbagi menjadi karyawan perempuan sebanyak 1576 atau (89,5 persen) dan karyawan laki-laki sebanyak 184 atau sekitar (10,5 persen). Di luar karyawan, kopwan juga sebagian merekrut tenaga-tenaga kerja/karyawan paruh waktu yang diduga jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja tetap. Sementara gambaran honor atau pendapatan yang diterima karyawan koperasi (tetap) cukup beragam berkisar antara Rp 400.000,- Rp 700.000,-. Ini menunjukkan bahwa kopwan memiliki peranan tidak saja memberikan keuntungan kepada anggota-anggotanya, akan tetapi juga masyarakat secara umum yang terserap sebagai tenaga kerja. Meskipun statusnya adalah koperasi wanita, dalam penyerapan tenaga kerja juga tidak membedakan klasifikasi gender. Artinya, kopwan juga sangat terbuka bagi kelompok laki-laki untuk terlibat di dalamnya dengan pembagian fungsi tertentu.

- j. Total volume usaha kopwan di 31 propinsi berjumlah Rp 1.401 trilyun. Rata-rata volume usaha per koperasi Rp 1,856 juta. Nilai volume usaha terbesar ada di Kopwan 'Kartika Chandra' Jatim sebesar Rp 110 milyar, sementara volume usaha terkecil Rp 208 ribu ada di Kopwan Mawar Jatim. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan mendasar yang dimiliki kopwan dalam pengelolaan usaha. Jika dilihat dari segi usia kopwan, keberadaan kopwan di Indonesia relatif sudah berlangsung lama, namun volume usaha yang dimiliki masih sangat kecil jika dibandingkan rentang waktu yang telah dilampaui.
- k. Total SHU kopwan di 31 propinsi di Indonesia berjumlah Rp 118 milyar. Rata-rata SHU per koperasi Rp 172 juta atau kira-kira 11 persen. Jumlah SHU yang relative masih rendah mengindikasikan bahwa kopwan secara umum masih mengalami persoalan dalam perkembangan usahanya sehingga akumulasi keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha yang dijalankan kopwan selama ini masih relatif kecil. Dari sini dapat diberikan catatan penting yang perlu diperhatikan bagi pengembangan kopwan di masa mendatang, yakni ada kecenderungan jumlah SHU yang rendah disebabkan oleh kegiatan koperasi sebagian besar belum dikelola secara profesional. Di samping itu, kegiatan kopwan nampak lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial ketimbang upaya pemberdayaan ekonomi anggotanya.
- l. Rentang usia kopwan terbaik yang dijadikan sebagai studi kasus antara 2 tahun sampai dengan yang berusia puluhan tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor usia bukan merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah kopwan.
- m. Faktor penentu keberhasilan kopwan lebih ditentukan oleh besarnya partisipasi anggota yang diwujudkan dari kedisiplinan anggota memenuhi kewajibannya dan mengaktifkan kegiatan yang dilakukan oleh kopwan. Dengan partisipasi anggota yang besar keberadaan dan keberlangsungan kopwan dapat dipelihara.

- n. Faktor penentu keberhasilan yang penting pada sebuah kopwan adalah pengurus. Semangat, kerja keras, disiplin, memiliki motivasi untuk maju, komitmen dan transparan pada sisi keuangan menjadi pelajaran penting yang dapat diambil dari 10 studi kasus.
- o. Dukungan karyawan/tenaga kerja menjadi faktor yang juga berpengaruh pada berjalannya kegiatan kopwan sesuai dengan yang seharusnya dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kopwan.
- p. Berbagai pelatihan dan studi banding pada banyak kasus kopwan menjadi inspirasi dan motivasi untuk mendorong kemajuan suatu kopwan menjadi berhasil atau lebih berhasil.
- q. Keberhasilan sistem tanggung renteng bukan didasarkan pada sistem tersebut tetapi pada kuat tidaknya solidaritas yang ada pada suatu kelompok. Jika tidak didukung oleh solidaritas yang kuat, sistem tanggung renteng hanya cenderung menguntungkan pihak pengurus kopwan, bukan untuk anggota kopwan. Pengurus kopwan dalam hal ini terlepas dari beban peluang kredit macet, sementara anggota kelompok cenderung mendapatkan beban tambahan baru.
- r. Peranan kopwan di Indonesia tidak saja memberi keuntungan bagi anggotanya, namun juga telah menjadi lembaga yang dapat menyerap tenaga kerja baik tetap maupun paruh waktu dalam jumlah yang cukup besar bagi perempuan maupun laki-laki.
- s. Melalui kopwan, perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Kegiatan kopwan mampu memberikan perhatian kepada kebutuhan perempuan secara lebih luas; peningkatan ekonomi, kesehatan reproduksi, keterampilan kerja dan keahlian lainnya, peningkatan kualitas pendidikan anak-anak anggota koperasi serta kesehatan keluarga.
- t. Peranan kopwan lebih luas dirasakan oleh komunitas atau masyarakat dimana kopwan tersebut berada. Berbagai jenis usaha –khususnya simpan pinjam—yang diberikan kepada wanita mampu memberikan kontribusi pada tingkat kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pendidikan anggota keluarga anggota kopwan. Melalui tingkat pendidikan yang lebih

baik, komunitas secara umum mampu melakukan mobilitas vertikal dan memperbaiki tingkat kesejahteraan hidupnya.

- u. Wanita secara umum, dari hasil penelitian kualitatif menunjukkan memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam pengembalian pinjaman. Faktor ini juga menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu kopwan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemacetan pinjaman anggota.

B. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan

Di luar faktor-faktor keberhasilan di atas, kopwan secara umum di Indonesia masih mengalami berbagai persoalan. Persoalan-persoalan yang dapat tertangkap dari kajian ini diantaranya adalah :

- a. Pada beberapa lokasi, kegiatan dan dinamika kopwan masih menemui masalah karena faktor budaya atau adat. Pada kasus Bali misalnya, intensitas kegiatan adat yang tinggi dan harus diikuti oleh perempuan, membuat perempuan tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk aktif di dalam kopwan.
- b. Keberadaan kopwan saat ini dihadapkan pada situasi persaingan yang cukup ketat dari lembaga-lembaga sejenisnya. Beberapa kasus unit waserda kopwan, misalnya yang bangkrut disebabkan karena hadirnya berbagai mini market di tingkat masyarakat. Unit usaha simpan pinjam pun dihadapkan pada persaingan dengan jasa yang diberikan dari lembaga-lembaga lainnya yang berfungsi seperti koperasi.
- c. Secara umum kopwan juga dihadapkan pada persoalan sistem kaderisasi yang lemah. Hal tersebut seringkali juga disebabkan karena tidak banyak perempuan yang memiliki potensi mau terlibat aktif dalam kegiatan kopwan. Hal ini disebabkan karena kegiatan koperasi menyita banyak waktu dengan tingkat keuntungan (honor atau pendapatan) yang tidak besar.
- d. Adopsi teknologi di tingkat kopwan relatif masih rendah. Khususnya penerapan sistem komputerisasi pada sistem administrasi maupun keuangan kopwan. Kopwan secara umum masih cenderung familiar terhadap sistem manual dan konvensional.
- e. Pada kopwan yang skala kegiatannya sudah besar muncul kecenderungan sistem pengurusan yang tertutup. Hal ini nampak dari laporan keuangan dan berbagai kebijakan yang berlaku di dalamnya sebagai informasi yang terbatas untuk pengurus dan anggotanya. Pihak luar tidak diperkenankan untuk mengakses berbagai informasi tersebut meskipun untuk kepentingan saling belajar.

- f. Pada beberapa kopwan nampak munculnya kecenderungan ketergantungan pada bantuan dari pemerintah, meskipun sebenarnya kopwan tersebut dapat mandiri tanpa bantuan pemerintah. Hal tersebut nampak dari harapan-harapan yang muncul yang senantiasa diarahkan kepada pemerintah untuk memperhatikan keberadaan kopwan dengan cara memberikan bantuan keuangan kepada kopwan.

C. Rekomendasi

- a. Kelemahan yang mendasar dari proses penelitian pendataan kopwan adalah ketersediaan data yang akurat mengenai perkembangan kopwan di masing-masing kabupaten dan propinsi. Untuk kepentingan monitoring perkembangan kopwan di Indonesia, sangat penting untuk dibuat format pengisian yang standar dan seragam untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Format pengisian tersebut idealnya dilakukan secara regular dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dalam sebuah payung hukum, sehingga pemerintah senantiasa dipermudah mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan kopwan di Indonesia untuk kepentingan perumusan dan penetapan kebijakan bagi kopwan. Keberadaan data yang akurat sangat menentukan efektivitas sebuah kebijakan.
- b. Untuk hal pendataan perlu dibangun suatu koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah di level kabupaten/kota maupun propinsi. Dalam hal ini perlu penataan birokrasi sehingga pembinaan koperasi benar-benar ditangani oleh individu yang professional dan berkompetan. Sistem *rooling* birokrat di daerah perlu ditinjau efektivitasnya khususnya bagi perkembangan kopwan ke depan. Untuk mendukung koordinasi ini, diperlukan pemutakhiran sistem pendataan/arsip yang bisa diakses langsung antar level pemerintah.
- c. Melalui sistem pendataan kopwan yang lebih sistematis dan baik maka diharapkan perhitungan keuangan kopwan menyangkut rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas juga dapat dihitung secara lebih baik dan akurat.

Data tersebut sangat berharga bagi pemerintah untuk menjadi data basis bagi penetapan suatu kebijakan bagi kopwan.

- d. Kopwan secara umum masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan manajemen pengelolaan koperasi secara professional. Kopwan idealnya dikelola secara sistematis, efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Manajemen yang professional juga sekaligus dapat menjadi bekal kopwan bersaing dengan lembaga-lembaga sejenisnya.
- e. Kopwan secara umum masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan usaha sehingga kopwan dapat meningkatkan kinerjanya dan memperbesar keuntungan bagi anggotanya. Pengembangan usaha untuk kopwan idealnya tidak saja dikaitkan dengan kebutuhan peranan perempuan (*domestic*) tetapi juga idealnya dikaitkan dengan pengembangan hobi anggota kopwan.
- f. Dalam implementasi sistem tanggung renteng bagi kopwan harus dibarengi dengan sistem asuransi/jaminan bagi anggota kopwan. Dalam hal ini penting dibangun suatu lembaga payung bagi kopwan-kopwan di tingkat propinsi atau pusat dimana lembaga payung tersebut sekaligus berfungsi sebagai penjamin bagi kopwan atau anggota kopwan yang berada di bawahnya.
- g. Perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di dalam kopwan.
- h. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap perkembangan kopwan sebaiknya secara cermat mempertimbangkan berbagai jenis bantuan yang akan diberikan kepada kopwan. Idealnya bantuan yang diberikan kepada kopwan dapat meningkatkan kinerja kopwan tanpa harus menumbuhkan ketergantungan kopwan terhadap bantuan eksternal. Dalam hal ini pemerintah dapat menetapkan kebijakan pemberian bantuan secara selektif kepada kopwan dengan cara memberikan bantuan (dalam bentuk apapun) kepada kopwan yang belum

pernah menerima bantuan, atau mendapatkan bantuan pemerintah tidak lebih dari 2 jenis bantuan.

- i. Kepada peneliti, pemerhati, dan akademisi untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian dari referensi untuk penelitian selanjutnya demi perbaikan lembaga ekonomi di Indonesia khususnya yang bersifat mikro.